STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) BD KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NO 8

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NO 8 TAHUN 2025 RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2028

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar secara minimal bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan perlu perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mencapai standar pelayanan minimal yang efektif
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021,
 - Peraturan ini menggarisbawahi bahwa SPM ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal dan harus tercantum dalam program-program pemerintah. Tim Penerapan SPM bertanggung jawab atas koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini melibatkan pengumpulan dan pemutakhiran data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan dasar.
- CATATAN :
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 Maret 2025
 - Lampiran 98 Halaman